



WALI KOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KUPANG

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Kupang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan efektif.
7. Kepala Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Kupang.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

10. Jenis ...

10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
12. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
18. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
19. Daerah adalah Kota Kupang.
20. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
22. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kupang.

BAB II
SPM BLUD UPTD PUSKESMAS

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Puskesmas wajib menerapkan SPM BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) SPM...

- (2) SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SPM Kesehatan yang diterapkan pada BLUD UPTD Puskesmas dan memuat ketentuan mengenai:
- Jenis Pelayanan Dasar; dan
 - Mutu Pelayanan Dasar,

Paragraf 2
Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 3

- Jenis Pelayanan Dasar pada SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - pelayanan kesehatan balita;
 - pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 - pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis; dan
 - pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus*, yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
- Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 4

- Mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan dalam Standar Teknis.
- Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan
 - petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar,
- Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari pemenuhan mutu pelayanan pada SPM BLUD UPTD Puskesmas setiap tahun.

(4) Standar...

- (4) Standar teknis pemenuhan mutu Pelayanan Dasar pada SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan pemenuhan mutu Pelayanan Dasar dan capaian penerima Pelayanan Dasar pada SPM BLUD UPTD Puskesmas kepada Wali Kota melalui Dinas setiap 3 (tiga) bulan melalui Sistem Informasi Puskesmas yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dinas berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pemenuhan mutu Pelayanan Dasar pada SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali setiap bulan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui dinas berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan untuk penyelenggaraan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM BLUD UPTD Puskesmas dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang pada
tanggal 28 November 2025

WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

JEFFERY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 736

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang (Pemrakarsa)	